

# Pertahanan Maritim: Antisipasi Ancaman Militer Melalui Kolaborasi Sumber Daya Nasional

Sumarlin<sup>1</sup>, Agus Adriyanto<sup>2</sup>, I Wayan Warka<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Pertahanan, Indonesia

<sup>1</sup>cekyin47@gmail.com

**Abstract** — *The increasing complexity of military threats in the maritime domain highlights the need for an integrated and collaborative approach in developing effective defense strategies. There is a requirement for in-depth analysis of the maritime defense concept, emphasizing the anticipation of military threats through the optimization of collaboration with national resources. This is supported by the identification of national resources, including human, natural, and artificial resources, as key elements in strengthening naval defense. The conceptual framework involving all main defense components, namely the Indonesian Navy (TNI AL), reserve components, and supporting components, has implications for the success of military defense. This collaboration is described as a comprehensive effort involving community empowerment, coordination of relevant sectors, and capacity building in facing evolving maritime threats. Case studies and examples of the implementation of this strategy are presented to support a practical understanding of the success of national resource collaboration in the context of maritime defense. Research findings indicate that collaboration with national resources not only strengthens military resilience but also expedites responses to threats. Therefore, this article provides policy recommendations to optimize cross-sector cooperation, involve communities, and enhance human resource capacity. As a contribution to strategic thinking in maritime defense, this article is expected to offer practical guidance for policymakers, practitioners, and academics engaged in national security and maritime defense.*

**Abstrak** — *Pertumbuhan kompleksitas ancaman militer dalam domain maritim mendorong perlunya pendekatan terpadu dan kolaboratif dalam membangun strategi pertahanan yang efektif. Perlu adanya analisis mendalam tentang konsep pertahanan maritim dengan penekanan pada antisipasi ancaman militer melalui optimalisasi kolaborasi sumber daya nasional. Hal ini didukung karena sumber daya nasional, termasuk sumber daya manusia, alam, dan buatan, diidentifikasi sebagai elemen kunci dalam memperkuat pertahanan laut. Kerangka kerja konseptual yang melibatkan semua komponen utama pertahanan, yakni TNI AL, komponen cadangan, dan komponen pendukung berimplikasi terhadap keberhasilan pertahanan militer. Kolaborasi ini dijelaskan sebagai upaya menyeluruh yang melibatkan pemberdayaan masyarakat, koordinasi sektor-sektor terkait, dan peningkatan kapasitas dalam menghadapi ancaman maritim yang berkembang. Kasus studi dan contoh implementasi strategi ini disajikan untuk mendukung pemahaman praktis mengenai keberhasilan kolaborasi sumber daya nasional dalam konteks pertahanan maritim. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kolaborasi sumber daya nasional bukan hanya memperkuat ketahanan militer, tetapi juga mempercepat tanggapan terhadap ancaman. Oleh karena itu, artikel ini memberikan rekomendasi kebijakan untuk mengoptimalkan kerjasama lintas sektor, melibatkan masyarakat, dan meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Sebagai kontribusi pada pemikiran strategis pertahanan maritim, artikel ini diharapkan mampu memberikan panduan praktis bagi perancang kebijakan, praktisi, dan akademisi yang berkecimpung dalam keamanan nasional dan pertahanan maritim.*

**Keywords** — *Maritime Defense, National Resource Collaboration, Military Resilience.*

**Kata Kunci** — *Pertahanan Maritim, Kolaborasi Sumber Daya Nasional, Ketahanan militer.*

## I. PENDAHULUAN

Dalam kehidupan bernegara, aspek pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan eksistensinya. Penyelenggaraan Pertahanan negara harus dilaksanakan dengan semesta yang mengikut sertakan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh kemampuan bangsa sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara yang menyatakan bahwa dalam menghadapi ancaman militer, TNI ditempatkan sebagai komponen utama dengan didukung oleh komponen cadangan dan pendukung.

Guna menghadapi ancaman militer aspek maritim yang menjadi tanggung jawab dari TNI AL dalam implementasinya melibatkan segenap sumber daya nasional yang ada sesuai dengan konsep pertahanan wilayah.

Dengan demikian perlu dilakukan analisis untuk mengetahui kemampuan sumber daya nasional dari suatu wilayah guna menghadapi ancaman militer aspek maritim. Khususnya wilayah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Oleh karena itu Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur dinilai sangat strategis, serta memiliki potensi yang cukup besar untuk dapat mengembangkan dan memberdayakan sumber daya nasionalnya. Sumdanas yang ada pada saat ini masih harus ditingkatkan pemberdayaannya. Pengoptimalisasian Sumdanas yang dimaksud berupa Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM), Sumber Daya Alam (SDA) dan Sumber Daya Buatan (SDB), serta sarana prasarana.

Dalam menghadapi ancaman militer aspek maritim diperlukan keselarasan dengan doktrin Strategi Pertahanan Laut Nusantara yang didasarkan kepada strategi pertahanan rakyat semesta, bahwa Pertahanan Negara Indonesia diselenggarakan dalam suatu Sistem Pertahanan Semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah, serta segenap sumber daya nasional yang dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berkelanjutan. Sistem Pertahanan Semesta dipersiapkan oleh pemerintah melalui usaha membangun kekuatan dan kemampuan pertahanan yang kuat dan disegani baik kawan maupun calon lawan. Dipersiapkan secara dini berarti Sistem Pertahanan Semesta dibangun secara terus-menerus sejak masa damai sampai masa perang. Guna menghadapi ancaman militer aspek maritim, TNI AL sebagai komponen utama didukung oleh komponen cadangan dan pendukung dengan memanfaatkan seluruh sumber daya nasional yang dimiliki. Untuk mewujudkannya diperlukan kerjasama dan tekad bulat yang dilandasi oleh Paradigma Nasional sebagai jiwa bangsa, peraturan perundang-undangan sebagai pedoman dalam pelaksanaannya dan teori-teori yang mendukung.

## II. METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian ini menerapkan metode deskriptif analitik dengan fokus pada analisis mendalam terhadap konsep pertahanan maritim dan antisipasi ancaman militer melalui kolaborasi sumber daya nasional. Berdasarkan kerangka kerja konseptual yang melibatkan TNI AL, komponen cadangan, dan komponen pendukung, penelitian ini bertujuan untuk menggali pemahaman mendalam tentang strategi pertahanan laut yang melibatkan berbagai sektor terkait.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

### **Landasan Idiil (Pancasila)**

Pancasila adalah ciri khas kepribadian bangsa Indonesia, penjelmaan falsafah dan pandangan hidup seluruh bangsa Indonesia yang secara resmi disahkan oleh PPKI (Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia) pada tanggal 18 Agustus 1945 dan tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 untuk mempersatukan bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara dan berbangsa untuk mencapai kehidupan kebangsaan yang bebas dalam wadah negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam pelaksanaan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila memberikan ruang bagi kemajemukan bangsa untuk hidup bersama berdampingan secara damai dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial yang berkeadilan. Pancasila melandasi tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga optimalisasi pemberdayaan sumber daya nasional yang ada dalam hal ini berupa sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan serta sarana dan prasarana secara terpadu harus dikelola, dikembangkan, dan dimanfaatkan guna menghadapi ancaman militer aspek maritim secara maksimal dalam bingkai NKRI demi kepentingan kehidupan seluruh bangsa Indonesia

### **Landasan Konstitusional (UUD 1945)**

Sebagai sumber hukum, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan hukum dasar yang tertulis dan mengikat bagi seluruh komponen bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 33 ayat (1), (2) dan ayat (3) telah diamanatkan untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan demikian perwujudan kesejahteraan sosial atau kemakmuran masyarakat dilaksanakan melalui perekonomian berdasarkan atas azas kekeluargaan untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia. Dalam penyelenggaraan pembelaan, pertahanan, dan keamanan negara peranan seluruh warga negara sangat diperlukan dan bukan hanya semata-mata merupakan tugas dari TNI. Pasal 27 ayat (3) menyebutkan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Selanjutnya dalam pasal 30 ayat (1) dinyatakan bahwa Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Dengan dasar di atas, maka peran seluruh warga

negara sebagai bagian dari sumber daya nasional sangat diperlukan guna menghadapi ancaman militer aspek maritim sehingga perlu diberdayakan dan sebagai komponen pertahanan untuk mewujudkan sistem pertahanan

negara yang bersifat semesta guna menjaga keutuhan wilayah NKRI. Sehingga dalam segala peraturan yang ada baik dari tingkat pemerintah pusat hingga pemerintah di daerah juga harus menyesuaikan peraturan-peraturan yang dibuatnya sesuai dengan UUD 1945. Beberapa ketentuan yang terkandung dalam UUD 1945 dapat dipandang sebagai landasan konstitusional dan arahan kinerja bagi sistem kehidupan nasional terutama pemberdayaan sumberdaya nasional guna menghadapi ancaman militer aspek maritim

### **Landasan Konseptual (Ketahanan Nasional)**

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia merupakan integritas dari setiap aspek kehidupan bangsa dan negara, pada hakekatnya merupakan kemampuan dan ketangguhan bangsa untuk menjamin kelangsungan hidup menuju kejayaan negara, bangsa dalam wadah Wawasan Nusantara yang bersatu dan damai. Strategi pemberdayaan sumber daya nasional sebagai komponen cadangan dan komponen pendukung pertahanan negara merupakan usaha yang dilaksanakan oleh pemerintah dan TNI AL guna menghadapi ancaman militer aspek maritim dalam rangka mewujudkan pertahanan Ibukota Negara (IKN). Bangsa Indonesia menyadari bahwa berbagai aspek kehidupan bangsa tidak mungkin diselenggarakan secara parsial atau terpisah-pisah, tetapi harus merupakan upaya terpadu seluruh komponen bangsa sehingga akan menghasilkan suatu kemampuan yang sinergis berupa peningkatan ketahanan setiap aspek kehidupan bangsa secara selaras, serasi dan seimbang.

### **Landasan Yuridis**

#### **Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.**

Dalam Undang-Undang Nomor 3 tahun 2002, Pasal 1 (2), yang menyatakan bahwa sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta, yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, berkesinambungan dan berkelanjutan untuk menegakkan kedaulatan keutuhan wilayah NKRI dan melindungi segenap bangsa dari setiap ancaman. Sistem pertahanan negara dalam menghadapi ancaman militer disusun dengan menempatkan TNI sebagai komponen utama (Pasal 7 ayat 2) dengan dukungan dari komponen cadangan dan pendukung. Komponen cadangan adalah meliputi warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional yang telah disiapkan untuk dikerahkan melalui mobilisasi guna memperbesar dan memperkuat komponen utama (Pasal 8 ayat 1) sedangkan komponen pendukung mencakup komponen cadangan yang secara langsung atau tidak langsung dapat meningkatkan kekuatan dan kemampuan komponen utama dan komponen cadangan (Pasal 8 ayat 2).

#### **Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.**

Perkembangan politik pemerintahan yang menekankan pada desentralisasi kewenangan dalam bentuk pemberian otonomi daerah sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004, Pasal 2 ayat (2). Otonomi yang diberikan meliputi juga kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayah laut yang meliputi kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut, pengaturan administrasi, pengaturan tata ruang, penegakan hukum, pemeliharaan keamanan dan pertahanan kedaulatan negara (Pasal 18). Hal ini tidak membawa implikasi pada kewenangan pemerintah pusat dalam urusan pertahanan negara (pasal 10).

#### **Undang-undang nomor 23 tahun 2019 tentang pengelolaan sumber daya nasional untuk pertahanan negara.**

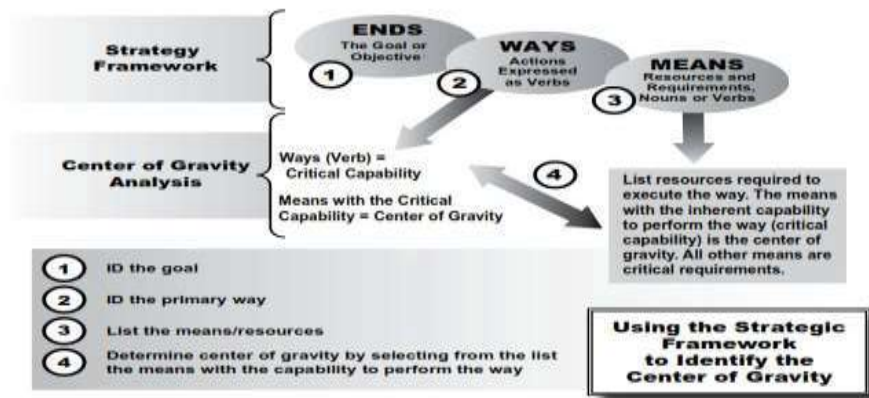
Pada Pasal 3 Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara bertujuan untuk mentransformasikan Sumber Daya Manusia, Sumber Daya Alam, dan Sumber Daya Buatan, serta Sarana dan Prasarana Nasional menjadi kekuatan Pertahanan Negara yang siap digunakan untuk kepentingan Pertahanan Negara. (Pasal 4) Pengelolaan Sumber Daya Nasional untuk Pertahanan Negara dipersiapkan secara dini untuk menghadapi Ancaman.

### **Landasan Teori**

#### **Teori Strategi**

Arthur F. Lykke Jr. mengembangkan *Strategic Framework* dari Tujuan (*ends*), Cara (*ways*) dan Sarana (*Means*). Bagi Lykke, strategi adalah ekspresi koheren dari proses yang mengidentifikasi tujuan, cara, dan sarana yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Sementara *framework* ini berguna untuk mengembangkan strategi, perencanaan juga dapat menggunakannya untuk menganalisis rencana dan tindakan

teman/musuh untuk menentukan kekuatan, risiko, dan, yang paling penting adalah pusat gravitasi (*Center Of Gravity*). Satu-satunya cara akurat untuk menentukan pusat gravitasi adalah dengan melibatkan penggunaan teori sistem dan mengambil sudut pandang holistik. Namun, teori sistem mencakup banyak hal, dan susah dimengerti pada node dan jaringan sistem. *The Strategic Framework to COG* tidak hanya menawarkan alur sederhana melalui jaringan sistem tetapi juga jalan pintas seperti pada ilustrasi gambar di bawah ini:



### Sumber Daya Manusia

#### 1. Komponen Utama

Pertahanan maritim sebuah negara tidak dapat dipisahkan dari peran penting sumber daya manusia (SDM), terutama personel TNI Angkatan Laut (TNI AL) yang menjadi garda terdepan dalam menjaga dan mengamankan perairan nasional. Dalam mendukung strategi pertahanan maritim, komponen utama SDM TNI AL memiliki peran krusial yang mencakup beberapa aspek penting.

##### a. Kualifikasi dan Keahlian

Personel TNI AL harus memiliki kualifikasi dan keahlian yang sesuai dengan tuntutan pertahanan maritim modern. Hal ini mencakup pengetahuan yang mendalam tentang navigasi, pengawasan perairan, taktik laut, dan kemampuan operasional di lingkungan laut yang dinamis. Pelatihan rutin dan pengembangan keahlian menjadi esensial agar personel TNI AL dapat menghadapi berbagai ancaman maritim dengan efektif. Selain itu, pengetahuan dan keahlian khusus dalam bidang teknologi maritim, penggunaan peralatan canggih, dan pemahaman terhadap isu-isu strategis dalam pertahanan laut juga menjadi bagian integral dalam menjaga kesiapan personel TNI AL.

##### b. Peningkatan Kapasitas Intelijen

Aspek intelijen menjadi salah satu pilar utama dalam mendukung pertahanan maritim. Personel TNI AL harus memiliki kapasitas intelijen yang tinggi untuk menganalisis dan memahami dinamika ancaman di wilayah perairan. Hal ini mencakup kemampuan untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menyampaikan informasi intelijen yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan strategis. Penyelenggaraan sistem intelijen yang efisien dan efektif dapat memastikan bahwa TNI AL memiliki pemahaman yang mendalam terhadap potensi ancaman, memungkinkan mereka untuk merancang strategi pertahanan maritim yang adaptif dan responsif.

##### c. Keterlibatan Masyarakat dan Kolaborasi Lintas Sektor

Pentingnya melibatkan masyarakat dalam mendukung pertahanan maritim tidak bisa diabaikan. Personel TNI AL harus memiliki kemampuan untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan masyarakat lokal, terutama di daerah pesisir. Ini melibatkan pembentukan hubungan yang positif, penyuluhan terkait keamanan maritim, dan pembangunan kepercayaan untuk mendukung kegiatan pengawasan dan pelaporan masyarakat. Kolaborasi lintas sektor juga merupakan aspek kunci dalam menghadapi ancaman

maritim. Personel TNI AL harus mampu berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya, untuk menciptakan sinergi dalam mengimplementasikan strategi pertahanan maritim.

#### d. Kesiapan Psikologis dan Fisik

Dalam situasi pertahanan maritim yang mungkin melibatkan tekanan dan tantangan yang tinggi, personel TNI AL perlu memiliki kesiapan psikologis dan fisik yang optimal. Pelatihan khusus, termasuk simulasi situasi darurat dan latihan taktis, dapat membantu membangun ketahanan mental dan fisik para personel. Kesiapan fisik melibatkan pemeliharaan kebugaran dan kesehatan yang baik agar personel dapat beroperasi di berbagai kondisi laut dengan optimal. Dalam konteks ini, pencegahan dan penanganan stres juga menjadi aspek yang perlu diperhatikan.

#### e. Pengembangan Pemimpin Militer yang Berkualitas

Komponen utama sumber daya manusia TNI AL dalam mendukung pertahanan maritim juga mencakup pengembangan pemimpin militer yang berkualitas. Pemimpin yang mampu mengambil keputusan taktis dan strategis dengan bijaksana, memiliki keterampilan kepemimpinan yang kuat, serta mampu memotivasi dan menginspirasi bawahannya menjadi kunci dalam memastikan keberhasilan strategi pertahanan maritim. Pendidikan dan pelatihan kepemimpinan yang berfokus pada konteks maritim, termasuk manajemen sumber daya manusia dalam situasi laut, menjadi aspek penting untuk menghasilkan pemimpin yang mampu mengatasi berbagai tantangan yang mungkin timbul dalam operasi pertahanan maritim.

#### f. Pemanfaatan Teknologi Terkini

Dalam menghadapi ancaman maritim yang semakin canggih, personel TNI AL juga harus memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam pemanfaatan teknologi terkini. Penggunaan sistem pemantauan dan sensor laut, teknologi satelit, serta peralatan komunikasi canggih menjadi bagian penting dalam operasi pertahanan maritim modern. Pelatihan secara berkala terkait dengan penggunaan teknologi ini akan membantu personel TNI AL untuk lebih efektif dalam mendeteksi, menganalisis, dan merespons ancaman maritim yang mungkin muncul.

## 2. Komponen Cadangan

Penyiapan komponen cadangan yang melibatkan warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, serta sarana dan prasarana nasional menjadi aspek krusial dalam membangun ketahanan maritim suatu negara. Dalam konteks ini, komponen cadangan bukan hanya dipandang sebagai penunjang, tetapi sebagai elemen yang secara signifikan dapat memperkuat daya jangkauan dan kapabilitas pertahanan maritim.

#### a. Keterlibatan Warga Negara

Keterlibatan warga negara sebagai komponen cadangan merupakan fondasi yang kuat dalam membangun pertahanan maritim yang inklusif. Kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat dalam mendukung keamanan laut menjadi langkah awal yang krusial. Program pelatihan dan penyuluhan kepada masyarakat, terutama yang tinggal di wilayah pesisir, dapat meningkatkan pemahaman mereka terhadap ancaman maritim dan peran yang dapat mereka mainkan. Selain itu, pembentukan unit sukarelawan atau pasukan cadangan di lingkungan masyarakat dapat menjadi modal tambahan dalam mendukung operasi pertahanan maritim. Keterlibatan warga negara secara langsung dapat menciptakan mata dan telinga tambahan di wilayah pesisir, memperkuat pengawasan terhadap aktivitas yang mencurigakan, dan mempercepat respons terhadap situasi darurat.

#### b. Optimalisasi Sumber Daya Alam

Sumber daya alam yang melibatkan potensi laut menjadi komponen cadangan yang tak terelakkan dalam membangun pertahanan maritim. Pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan tidak hanya mendukung pertumbuhan ekonomi melalui sektor kelautan, tetapi juga menjadi sumber daya potensial untuk mendukung pertahanan maritim. Penyiapan armada nelayan sebagai mata-mata informal di laut, pelibatan nelayan lokal dalam pemantauan aktivitas di sekitar wilayah perairan, dan pemanfaatan potensi perikanan sebagai sumber daya ekonomi dan informasi menjadi strategi yang efektif dalam memanfaatkan sumber daya alam sebagai komponen cadangan.

#### c. Sumber Daya Buatan

Sumber daya buatan, terutama teknologi dan inovasi, menjadi komponen cadangan yang esensial dalam mendukung pertahanan maritim. Pengembangan teknologi pemantauan dan sensor laut, sistem komunikasi canggih, serta inovasi dalam desain dan konstruksi kapal perang menjadi aspek yang perlu

diperhatikan. Kolaborasi antara pihak militer, industri teknologi, dan lembaga penelitian dapat mempercepat pengembangan sumber daya buatan sebagai komponen cadangan. Pemanfaatan teknologi drone, sensor pintar, dan sistem komunikasi terenkripsi dapat meningkatkan daya tanggap dan efektivitas operasi pertahanan maritim.

d. Pemeliharaan dan Peningkatan Sarana dan Prasarana Nasional

Sarana dan prasarana nasional, termasuk pangkalan laut, dermaga, dan fasilitas pendukung lainnya, menjadi infrastruktur penting dalam mendukung pertahanan maritim. Pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur ini memastikan bahwa TNI AL memiliki basis operasional yang solid dan siap untuk

merespons berbagai ancaman maritim. Pengembangan pangkalan laut yang strategis, pemeliharaan dermaga untuk kapal perang, serta peningkatan sarana pendukung seperti helikopter, pesawat patroli, dan kendaraan laut menjadi langkah krusial dalam penyiapan sarana dan prasarana sebagai komponen cadangan.

e. Keterlibatan Industri Maritim sebagai Mitra Strategis

Industri maritim memiliki peran yang strategis dalam mendukung pertahanan maritim sebagai komponen cadangan. Kerjasama dengan industri galangan kapal, produsen peralatan maritim, dan lembaga penelitian teknologi maritim dapat memperkuat kemampuan TNI AL. Pengembangan kapal perang modern, sistem senjata canggih, dan teknologi pendukung operasi laut merupakan hasil kolaborasi antara TNI AL dan industri maritim. Ini tidak hanya meningkatkan daya jangkauan dan kapabilitas, tetapi juga menciptakan keberlanjutan industri yang mendukung pertahanan maritim.

f. Peningkatan Kapasitas Pelatihan dan Latihan

Penyiapan komponen cadangan juga mencakup peningkatan kapasitas melalui pelatihan dan latihan rutin. Personel militer dan sivitas maritim perlu diberdayakan dengan keterampilan dan pengetahuan terkini terkait taktik pertahanan maritim, penggunaan teknologi, serta penanganan situasi darurat. Latihan bersama antara TNI AL, pasukan cadangan, dan pihak terkait lainnya dapat meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam menjawab ancaman maritim. Hal ini juga menciptakan kepekaan terhadap perubahan situasi dan meningkatkan kemampuan respons cepat.

3. Komponen Pendukung

Komponen pendukung dalam pertahanan militer melibatkan sejumlah faktor dan aspek yang mendukung efektivitas dan kelangsungan operasi pertahanan suatu negara. Berikut adalah beberapa komponen pendukung dalam pertahanan militer:

a. Intelijen dan Pengawasan:

- 1) Pengumpulan Informasi: Membantu dalam mengumpulkan, menganalisis, dan mengevaluasi informasi intelijen terkait potensi ancaman atau kegiatan musuh.
- 2) Analisis Intelijen: Menganalisis data untuk menyusun gambaran yang jelas tentang kekuatan, kelemahan, dan niat musuh.
- 3) Pengawasan: Melibatkan pemantauan terus-menerus terhadap pergerakan musuh dan aktivitas yang mencurigakan.

b. Logistik:

- 1) Persediaan dan Distribusi: Menyediakan dan mendistribusikan peralatan, senjata, amunisi, dan peralatan lainnya ke berbagai lokasi di wilayah pertahanan.
- 2) Perawatan dan Perbaikan: Menjaga peralatan dan kendaraan agar tetap dalam kondisi operasional yang optimal melalui perawatan dan perbaikan yang teratur.

c. Teknologi dan Komunikasi:

- 1) Teknologi Militer: Pengembangan dan pemanfaatan teknologi canggih, seperti sistem senjata, kendaraan tanpa awak, dan perangkat pemantauan.
- 2) Sistem Komunikasi: Membangun dan memelihara sistem komunikasi yang aman dan andal untuk koordinasi antara pasukan dan pimpinan.

d. Personel Kesehatan dan Medis:

- 1) Perawatan Medis: Menyediakan perawatan medis yang cepat dan berkualitas bagi personel yang terluka atau sakit.
- 2) Sarana Medis: Memastikan ketersediaan sarana medis dan fasilitas perawatan di berbagai lokasi strategis.

e. Pendidikan dan Pelatihan:



- 1) Pendidikan Militer: Melibatkan pelatihan dan pendidikan bagi personel militer untuk meningkatkan keterampilan, pengetahuan, dan disiplin.
  - 2) Latihan Militer: Melakukan latihan rutin untuk meningkatkan kesiapan, koordinasi, dan respons pasukan terhadap berbagai skenario.
- f. Hubungan Masyarakat dan Diplomasi:
- 1) Hubungan Masyarakat: Membangun dukungan publik dan memelihara citra positif dalam masyarakat terkait pertahanan militer.
  - 2) Diplomasi Militer: Berpartisipasi dalam diplomasi militer untuk membangun hubungan kerja sama atau mengelola ketegangan dengan negara-negara lain.
- 1) Anggaran Pertahanan: Mencakup alokasi dan manajemen dana untuk mendukung kebutuhan pertahanan militer.
  - 2) Pengelolaan Keuangan: Memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan pertahanan.
- h. Sistem Hukum dan Keamanan Dalam Negeri:
- 1) Hukum Militer: Menegakkan hukum militer dan menjalankan sistem peradilan militer.
  - 2) Keamanan Dalam Negeri: Menjaga stabilitas dan keamanan dalam negeri untuk mendukung operasi pertahanan militer.

## VI. KESIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

Bahwa strategi pertahanan maritim yang efektif memerlukan pendekatan kolaboratif yang melibatkan berbagai sumber daya nasional. Kolaborasi ini mencakup peran vital warga negara, optimalisasi sumber daya alam dan buatan, keterlibatan industri, serta koordinasi lintas sektor. Pentingnya antisipasi terhadap ancaman militer menuntut adanya upaya bersama dalam memanfaatkan sumber daya nasional. Melalui kolaborasi yang sinergis, pertahanan maritim dapat menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika ancaman yang berkembang di domain maritim. Kesadaran akan peran strategis sumber daya manusia, termasuk warga negara sebagai komponen cadangan, menjadi landasan bagi upaya pertahanan maritim yang inklusif. Pemanfaatan sumber daya alam dan buatan dengan keberlanjutan memperkuat daya jangkauan pertahanan, sementara keterlibatan industri maritim sebagai mitra strategis mempercepat pengembangan teknologi dan inovasi.

Kolaborasi sumber daya nasional juga mencakup peningkatan kapasitas intelijen, pemeliharaan infrastruktur, dan peran penting teknologi dalam mendukung operasi pertahanan maritim. Selain itu, kesiapan dan partisipasi masyarakat dalam pemantauan dan pelaporan aktivitas mencurigakan di wilayah pesisir menjadi elemen kunci dalam mengamankan perairan nasional. Dengan demikian, melalui kolaborasi sumber daya nasional, negara dapat mengantisipasi dan menghadapi ancaman militer dengan lebih efektif di lingkungan maritim. Artikel ini menyoroti pentingnya sinergi antara berbagai komponen dalam menjaga keamanan laut, dan rekomendasi kebijakan yang dihasilkan dari pemahaman ini diharapkan dapat membimbing perancang kebijakan, praktisi, dan akademisi dalam memperkuat pertahanan maritim..

### Saran

1. Peningkatan Kesadaran Publik. Meningkatkan kampanye informasi untuk meningkatkan kesadaran publik mengenai pentingnya pertahanan maritim dan peran masyarakat sebagai bagian dari komponen cadangan.
2. Program Pelatihan Masyarakat. Menyusun program pelatihan bagi masyarakat pesisir dalam pengawasan dan pelaporan aktivitas mencurigakan, menciptakan keterlibatan yang aktif dalam keamanan maritim.
3. Optimalisasi Sumber Daya Alam. Mengembangkan strategi untuk optimalisasi sumber daya alam, termasuk pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan pemanfaatan potensi laut sebagai aset strategis dalam pertahanan.
4. Kerjasama dengan Industri Maritim. Membangun kerjasama yang lebih erat dengan industri maritim untuk merancang dan mengimplementasikan teknologi terkini, seperti pengembangan drone laut dan sensor pintar, guna memperkuat kemampuan pemantauan dan deteksi.
5. Peningkatan Keterlibatan Industri Teknologi. Mendorong sektor industri teknologi untuk berkontribusi pada pengembangan sistem komunikasi dan keamanan maritim yang canggih guna meningkatkan respons dan koordinasi antara pasukan pertahanan.
6. Koordinasi Lintas Sektor. Meningkatkan koordinasi antarinstansi terkait, seperti TNI AL, kepolisian, pemerintah daerah, dan lembaga terkait lainnya, dalam menyusun rencana pertahanan maritim yang terintegrasi.
7. Peningkatan Kapasitas Intelijen. Mengembangkan kapasitas intelijen maritim untuk meningkatkan

kemampuan pengumpulan dan analisis informasi terkait ancaman militer di perairan nasional.

8. Pemeliharaan dan Peningkatan Infrastruktur. Mengalokasikan dana untuk pemeliharaan dan peningkatan infrastruktur pendukung pertahanan maritim, termasuk pangkalan laut, dermaga, dan sarana pendukung lainnya.

9. Penguatan Kemitraan Regional. Meningkatkan kerjasama dengan negara-negara tetangga dalam hal pertukaran intelijen, patroli bersama, dan koordinasi untuk menghadapi ancaman maritim bersama.

10. Pendanaan dan Anggaran yang Optimal. Memastikan alokasi dana yang cukup dan optimal untuk mendukung program pertahanan maritim, termasuk pengembangan kapasitas dan investasi dalam teknologi terbaru.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Ampun, Artha C. Rosevina Anak Ampun, and Andri Octapianus Purba. 2021. "Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Sebagai Poros Maritim Dunia." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 8 (3): 321–25. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/index>.
- [2] Asrul, Muhamad, Arifin Andika P, Heber Heber, and Eliyanti Agus Mokodompit. 2023. "Strategi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Usaha Pengamanan Wilayah Indonesia." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2 (7): 2859–64. <https://doi.org/10.55681/sentri.v2i7.1226>.
- [3] Kementerian Pertahanan Republik Indonesia. 2015. "Buku Putih Pertahanan Indonesia 2015 Kementerian Pertahanan Republik Indonesia." Kementerian Pertahanan Republik Indonesia.
- [4] Listiyono, Yudi, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. 2019. "Strategi Pertahanan Laut Dalam Pengamanan Alur Laut Kepulauan Indonesia Untuk Mewujudkan Keamanan Maritim Dan Mempertahankan Kedaulatan Indonesia." *Strategi Pertahanan Laut* 5 (3): 103–16.
- [5] Mahendra, Reza, Pujo Widodo, Herlina Juni Risma Saragih, Panji Suwamo, Widodo, and Bayu Asih Yulianto. 2023. "Pencegahan Ancaman Penyebaran Radikalisme Dan Terorisme Oleh BNPT Di Wilayah Kemaritiman Sebagai Upaya Pertahanan Negara Republik Indonesia." *Jurnal Kewarganegaraan* 7 (1): 204–12.
- [6] Malik, Kurnia. 2020. "Mahasiswa Prodi Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Hasanuddin,." 1–9.
- [7] Nasution, A. M., Wiranto, S., & Madjid, A. 2018. "Sinergi Antara Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) Dan Pembinaan Desa Pesisir (BINDESIR) Untuk Membentuk Satuan Armada Nelayan (SATARMANEL) Dalam Rangka Mencegah Ancaman Keamanan Maritim." *Keamanan Maritim* 4 (1): 25–46.
- [8] Prasetyo, Kuncoro Arry, Lukman Yudho Prakoso, and Dohar Sianturi. 2019. "Strategi Pertahanan Laut Pemerintah Indonesia Dalam Menjaga Keamanan Maritim (Marine Defense Strategy the Government of Indonesia in Keeping Maritime Security)." *Jurnal Strategi Pertahanan Laut* 5 (1): 31–50.
- [9] Rusdiana, Dede, Yusuf Ali, Suyono Thamrin, and Resmanto Widodo. 2021. "Strategi Pembangunan Industri Pertahanan Pada Negara Kepulauan Guna Mendukung Pertahanan Negara." *Jurnal Academia Praja* 4 (2): 427–40. <https://doi.org/10.36859/jap.v4i2.629>.
- [10] Samy, Muhammad, and Jayanti Aarnee Kusumadewi. 2021. "Diplomasi Pertahanan Maritim Indonesia Dalam Menghadapi Ancaman Keamanan Non-Tradisional Upaya Mewujudkan Visi Poros Maritim Dunia." *Jurnal Hubungan Internasional* 14 (1): 45. <https://doi.org/10.20473/jhi.v14i1.25547>.
- [11] Saputra, Dede Anggara. 2020. "Analisis Politik Hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional Untuk Pertahanan Negara." *Jurnal Lex Renaissance* 5 (4): 946–61. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol5.iss4.art13>.
- [12] Sumadinata, Widya Setiabudi. 2022. "Membangun Kebijakan Pertahanan Maritim Indonesia: Telaah Kritis Fungsi Keamanan Laut Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut." *Ijd-Demos* 4 (2): 722–31. <https://doi.org/10.37950/ijd.v4i2.259>.
- [13] Sumber, Potensi, Daya Nasional, D I Kalimantan, and Timur Guna. 2023. "NASIONAL DI KALIMANTAN TIMUR GUNA MENGHADAPI" 6 (4): 965–74.
- [14] Susanti, Hesti Dwi Reli, and Ferinzka Emeraldia Putri. 2020. "Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum Fairness and Justice : Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum." *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* 18 (1): 33–43.
- [15] Zulkarnain, I., & Runturambi, A. J. S. 2022. "Sumber Daya Nasional Komponen Cadangan Dalam Memperkuat Ketahanan Negara." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 4 (6): 9937–49.